

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bentuk usaha yang kini marak diperbincangkan dan memenuhi dunia usaha di Indonesia, hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) yang menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai angka 64,2 Juta. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM dibagi berdasarkan skalanya, yakni Usaha Mikro, Usaha kecil, dan Usaha Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, bentuk usaha yang terakhir adalah Usaha Menengah. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Untuk saat ini, mengacu pada data dari KemenkopUKM bulan Maret 2021 mengenai jumlah UMKM di Indonesia, UMKM merupakan salah satu bentuk pilar penting dalam perekonomian Indonesia saat ini. Jumlah UMKM yang saat ini mencapai 64,2 juta, kontribusi UMKM terhadap PDB sangatlah besar yakni sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah, lebih tinggi dari usaha besar yang mencapai 5.464,7 triliun rupiah. Selain itu UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil sebanyak 5,8 juta, dan usaha menengah sebanyak 3,7 juta. Selain itu berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), UMKM dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tiga hal ini tentunya sudah cukup untuk membuktikan bahwa benar UMKM saat ini adalah salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.

Dengan besarnya pengaruh UMKM ini, pemerintah pun menyediakan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk mendukung dan memajukan UMKM. Kebijakan tersebut berupa kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, serta kebijakan Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui *ASEAN Online Sale Day* (AOSD).

Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia ini tentunya terdiri dari bentuk usaha yang beragam, mulai dari jasa, dagang dan juga manufaktur tentunya. Dengan fakta ini Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan KemenkopUKM beserta para ahli menyerukan bahwa UMKM membutuhkan penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain dapat memberikan gambaran usaha, laporan keuangan juga dapat menunjukkan hal-hal yang perlu diperhatikan agar usaha dapat dijalankan dengan baik. Contohnya perbandingan saldo beban persediaan dan juga saldo laba usaha yang menunjukkan seberapa efisien penggunaan persediaan dalam kegiatan usaha, sehingga pihak UMKM dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan UMKMnya.

Untuk ketentuan penyusunan laporan keuangan UMKM sekarang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang mana telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM adalah suatu standar yang disusun oleh IAI untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) (IAI, 2021). Standar ini diperuntukan bagi pengusaha yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi dalam SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). SAK EMKM ini sendiri ditujukan untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek-aspek yang disebutkan

sebelumnya seperti kejelasan laporan keuangan UMKM selama ini menjadi tantangan terbesar UMKM di Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan, sehingga menghambat pertumbuhan dan peran UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia di masa depan (Adawiyah, 2013).

Jati (2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2011) menyatakan bahwa mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan tentang jumlah dana yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, keluar masuknya barang dan jumlah utang atau piutang yang dimiliki. Pencatatan sebagai berikut tidak dapat membantu pihak UMKM dalam mendapatkan akses ke bank. Laporan keuangan yang dibuat dengan seadanya tentu akan berdampak pada kelangsungan usaha kedepannya dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan UMKMnya (Priyanto, 2021). Padahal sebagaimana yang diketahui laporan keuangan yang baik memiliki fungsi yang signifikan pada UMKM sendiri untuk menjadi alat ukur dan analisa apakah UMKM sedang dalam kondisi yang baik atau tidak (Siagian, 2019). Dengan demikian, pelaku usaha bisa memantau perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Selain itu, bagi pemilik UMKM sendiri laporan keuangan berfungsi memberi informasi tentang sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas UMKM, serta juga berperan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan usaha.

Setelah melihat kebutuhan pelaporan keuangan yang sesuai standar tersebut cukup krusial, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan analisis implementasi SAK EMKM dengan mengambil judul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MAYKHA LAUNDRY SESUAI DENGAN SAK-EMKM PERIODE JANUARI-APRIL 2022”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang diterapkan pada Maykha Laundry?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan Maykha Laundry telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan UMKM (SAK EMKM)?
3. Bagaimanakah implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM Maykha Laundry?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan KTTA ini adalah:

1. Untuk meninjau serta menganalisa penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak Maykha Laundry;
2. Untuk meninjau apakah laporan keuangan yang dibuat oleh pihak Maykha Laundry telah sesuai dengan SAK EMKM, dan menunjukkan hasil tinjauan kesesuaiannya;
3. Untuk mengimplementasikan SAK EMKM pada UMKM Maykha Laundry, agar laporan keuangan Maykha Laundry dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan UMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tahap akhir ini, penulis akan berfokus untuk meninjau kesesuaian antara penyusunan laporan keuangan yang dibuat pihak Maykha Laundry dengan pedoman Akuntansi UMKM (SAK EMKM), serta mengimplementasikan SAK EMKM dalam laporan keuangan Maykha Laundry. Laporan yang akan dijadikan objek tinjauan penulis adalah laporan keuangan yang

dibuat Maykha Laundry pada periode Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, dan April 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan karya tulis ini penulis berharap, karya tulis ini dapat bermanfaat untuk semua orang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap karya tulis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pembaca, akan betapa pentingnya laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan SAK EMKM, serta keuntungan yang akan diperoleh dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Penulis

Diharapkan karya tulis ini akan memberikan pengetahuan dan pedoman bagi penulis untuk dapat mengimplentasikan cara menyusun serta menyajikan Laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ada, yaitu SAK EMKM.

b. Manfaat bagi Maykha Laundry dan Pembaca

Bagi pihak Maykha Laundry dan pembaca diharapkan nantinya karya tulis ini akan dapat menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan dan penyajian Laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan, agar dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan UMKM, serta dapat bersaing dengan unit usaha lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memuat gambaran umum karya tulis, yang didalamnya penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisannya, metode pengumpulan data yang digunakan, serta sistematika penulisan yang akan digunakan penulis dalam membuat karya tulis tahap akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan memuat tentang teori-teori yang berasal dari pengumpulan data sebelumnya, yang akan dijadikan acuan/kerangka untuk penyelesaian penulisan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menuliskan metode-metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Selain itu, penulis juga akan memaparkan pembahasan mengenai objek penulisan, yakni peninjauan kesesuaian antara penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak Maykha Laundry dengan standar yang ada (SAK EMKM).

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang terdapat di bab-bab sebelumnya, sehingga penulis akan menyajikan simpulan dan saran yang didasarkan dan disesuaikan dengan objek penelitian ini, agar dapat menghasilkan solusi dan berguna untuk pihak yang ditujukan dalam penelitian ini.